

REGISTER RESIKO DAN PENGENDALIAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2025

Nama OPD : Kapanewon Panjatan
 Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
 Sasaran : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
 : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon
 Indikator Kinerja Utama : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
 : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Tujuan kegiatan	PERNYATAAN RISIKO		PENYEBAB RISIKO	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Sudah ada	SIFA T U/C	STATUS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	Pemilik risiko/ penanggun	Target Waktu
			No.	PERNYATAAN RISIKO					KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKO R			
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya													
1	Gelar Budaya Jogja	Melestarikan seni dan tradisi budaya jogja		Penyelenggaraan even budaya kurang semarak	Potensi unggulan tiap wilayah belum terpetakan dan kurangnya koordinasi lintas sektor	Turunnya antusias dan semangat masyarakat dalam pelestarian seni, tradisi, dan budaya jogja	Pemetaan potensi unggulan, serta koordinasi dan monitoring secara berkala	C	2	3	6	Meningkatkan frekuensi koordinasi dan monitoring	Kepala Jawatan Sosial	2025
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan													
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian progam kegiatan urusan keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan		Kualitas pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan di lingkup Kapanewon dan Kalurahan kurang terpantau dan terkoordinasi	Perubahan nomenklatur dan dasar hukum dalam proses penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan belum semuanya terkoordinasikan dengan baik antara Kapanewon dan Kabupaten	Progres dan hasil pelaksanaan program Urusan Keistimewaan di lingkup Kapanewon tidak terukur	Monitoring lapangan dan memantau melalui aplikasi KENES	C	2	3	6	Melaksanakan koordinasi secara intensif verifikasi usulan dais kalurahan dan monitoring pelaksanaan program secara berkala	Kepala Jawatan Praja	2025
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya pedoman perencanaan Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan		Kualitas dokumen perencanaan yang kurang optimal	kurangnya koordinasi internal antar jawatan kurang maksimal	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat terukur secara efektif, sehingga menghasilkan output yang tidak maksimal	Meningkatkan intesitas koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	C	2	2	4	Koordinasi berkala Sekretariat dan Jawatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	setiap hari senin
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja, LKJIP, Laporan Tahunan, serta penerapan SPIP		Kelalaian dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	tidak dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi kinerja	tidak terukurnya pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan intesitas koordinasi antar PPTK dalam pelaksanaan kegiatan	C	2	3	6	Koordinasi berkala Sekretariat dan Jawatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	sebulan sekali dan atau sesuai keperluan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak ASN atas Gaji dan Tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Kurangnya ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Kurang cermatnya perhitungan anggaran	Gaji dan tunjangan terkendala dibayarkan	Sinkronisasi perhitungan bendahara gaji, bendahara pengeluaran, dan pengelola kepegawaian	C	2	3	6	Koordinasi berkala Sekretariat untuk reviu dan cek	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	setiap hari senin

[illegible]

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terpantaunya perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakat		Rendahnya minat baca buku pada masyarakat	Pesatnya perkembangan media sosial dan buku digital	Perpustakaan sepi peminat/ pengunjung	Menghimbau Lurah untuk penataan perpustakaan Kalurahan	C	2	3	6	Koordinasi dengan Kalurahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Jawatan Sosial	2025
		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi dasar		Penurunan prestasi/ hasil ujian siswa	Kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran karena <i>gap knowledge</i> pembelajaran online saat pandemi	Target ketuntasan belajar siswa tdk tercapai	Koordinasi intensif dengan sekolah dan lintas sektor lain untuk merumuskan solusi	C	2	3	6	Koordinasi dengan pihak sekolah dan K3S, juga Pengawas sekolah yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan	Kepala Jawatan Sosial	2025
		Terciptanya PKBM yang kondusif bagi masyarakat		Minat masyarakat untuk bergabung di PKBM menurun	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi PKBM	Implementasi fungsi dan peran PKBM kurang optimal	Melakukan Pembinaan PKBM & mendorong Pemkal untuk mensosialisasikan PKBM pada masyarakat	C	2	3	6	Koordinasi dengan Kalurahan, Pengurus PKBM, dan Dinas Dikpora melalui Penilik Kesetaraan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program-program PKBM	Kepala Jawatan Sosial	2025
		Terwujudnya PAUD yang holistik integratif		Honor Pendidik dan Pengelola PAUD yang masih rendah	Adanya SK Bupati Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	Kualitas pembelajaran PAUD kurang optimal	Monitoring berkala libatkan lintas sektor dan mendorong peningkatan partisipasi/ swadaya orang tua siswa	C	2	3	6	Berkoordinasi dengan dikpora melalui Penilik PAUD untuk mengkaji usulan perubahan SK Bupati omor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	Kepala Jawatan Sosial	2025
		Meningkatnya prestasi kontingen Kapanewon Panjatan pada festival seni dan budaya		Masyakat/ generasi muda kurang antusias menekuni kesenian	Pelatihan dan pembinaan seni dan budaya kurang optimal	Kontingen festival seni dan budaya Kapanewon Panjatan belum bisa meraih prestasi maksimal	Pendampingan intensif kepada kelompok seni dan berkoordinasi dengan pendamping budaya	C	2	2	4	Koordinasi dengan Kalurahan, Koordinator Budaya Kapanewon, dan Dinas Budaya	Kepala Jawatan Sosial	2025
		Terwujudnya kegiatan generasi muda yang aktif dan kreatif		Menurunnya minat dan antusias generasi muda aktif berkiprah di masyarakat	Meningkatnya individualisme karena pengaruh teknologi/media sosial	Organisasi kepemudaan stagnan/ tidak aktif	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	C	2	3	6	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	Kepala Jawatan Sosial	2025
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas peran PPK dan pemenuhan tertib administrasi		Pelaksanaan peran PKK dan pengelolaan administrasi PKK belum sesuai dengan pedoman hasil Rakernas IX PKK	Keterbatasan waktu SDM yang menangani karena terkendala tugas wajib	Pengelolaan administrasi belum sesuai dengan hasil Rakernas IX PKK	Koordinasi dan pembinaan pengurus kapanewon dan monitoring ke Kalurahan	C	2	2	4	Koordinasi dengan TP PKK Kabupaten dan Kalurahan	Kepala Jawatan Sosial	2025

		Terwujudnya situasi sosial yang kondusif	Penanganan masalah kurang efektif	Masifnya jenis dan kuantitas permasalahan yang muncul	Penanganan penyandang masalah sosial terbatas hanya yang dilanorkan	Meningkatkan koordinasi dengan pendamping dari instansi terkait	C	2	3	6	Koordinasi dengan Dinsos P3A, KPKD, Forkopimkap, dan Kalurahan	Kepala Jawatan Sosial	1 tahun
		Terwujudnya pendampingan penyelesaian permasalahan sosial yang berkualitas	Kompleksnya penanganan masalah kemiskinan	Tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat masih rendah	Tugas dan tanggung jawab KPKD semakin berat	Memberikan tambahan berupa uang transport, koordinasi dengan Kalurahan untuk memberikan uang transport	C	2	3	6	Koordinasi dengan Dinsos P3A	Kepala Jawatan Sosial	1 tahun
		Terwujudnya Kapanewon Sehat sesuai indikator yang ditetapkan	Pemenuhan indikator 10 tatanan tidak lengkap dan cenderung lambat	Terbatasnya anggaran dan SDM pelaksana, serta ketersediaan dokumen bukti dukung	Pencapaian target pemenuhan 10 tatanan kapanewon sehat tidak optimal	Pembinaan SDM Tim Kecamatan Sehat	C	2	2	4	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Kecamatan Sehat Kapanewon dan Kabupaten	Kapanewon Panjatan	1 tahun
		Meningkatnya kesadaran perspektif gender dan antisipasi terhadap pencegahan KDRT	Meningkatnya kasus KDRT di masyarakat	Kurangnya pemahaman terhadap kesadaran perspektif gender dan ketahanan keluarga	Kehidupan sosial keluarga di masyarakat kurang harmonis	Sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT dan kesadaran perspektif gender	C	2	3	6	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinsos P3A, Polsek, KUA, Kalurahan)	Dinsos P2PA, KUA, Kapanewon, Kalurahan	1 tahun
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN)	Pemenuhan standar pelayanan publik belum optimal	Kelengkapan fasilitas pelayanan (ruang laktasi dan tempat bermain anak) yang kurang layak	Indeks Kepuasan masyarakat menurun	Mengoptimalkan ruang yang ada dengan sekat non permanen	C	2	3	6	Mengusulkan pembuatan sekat permanen	Kawat Pelayanan Umum	Usulan APBD P 2025
E.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya musrenbang yang aspiratif sesuai prosedur dan tahapan perencanaan	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat	Adanya pagu anggaran perencanaan	Apatisnya masyarakat dalam usulan pembangunan	Koordinasi intensif dnegan Pemerintah Kalurahan bahwa usulan berdasarkan skala prioritas	C	3	2	6	Pemahaman Kepada Pamong, BPK, Lembaga Kalurahan dan Masyarakat tentang Musrenbang Tingkat Kapanewon merupakan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang harus dilaksanakan	Jawatan Kemakmuran	Tri Wulan Pertama Tahun 2025
		Tersedianya data profil Kapanewon yang berkualitas	Data dianggap tidak valid	Indikator data belum selaras dengan kebijakan dan kebutuhan data Pemerintah Kabupaten	Ketidakpercayaan pengguna data	Koordinasi intensif Tim Profil bersama Kalurahan	C	3	2	6	Konsultasi indikator data dengan Bappeda dan Dinas Kominfo	Jawatan Kemakmuran	Semester I dan II Tahun 2025
		Meningkatnya partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya partisipasi untuk mensukseskan BBGRM	Sikap apatis masyarakat terhadap tidak tertampungnya usulan pembangunan	Motivasi dan semangat membangun semakin menurun	Memberikan pemahaman agar Kalurahan bisa menyiapkan lokasi dan partisipasi masyarakat denngan sebaik baiknya	C	2	3	6	Melakukan koordinasi intensif lintas sektor agar pelaksanaan BBGRM bisa bisa berjalan dengan baik	Jawatan Kemakmuran	Tri Wulan II Tahun 2025
		Meningkatnya kualitas dan profesionalitas pengelolaan BUMDes	BUMDes belum berkembang secara optimal	'Kurangnya inovasi dan profesionalisme bisnis pengelola BUMDes	Target PAD belum tercapai	Pembinaan Pengelola BUMDes	C	2	3	6	Bimtek pengurus BUMDes dan penambahan modal dari Pemerintah Kalurahan bagi BUMDes yang berkompeten	Jawatan Kemakmuran	Semester I dan II Tahun 2025

		Meningkatnya prestasi perwakilan Lomba Desa		Kurangnya semangat dan antusiasme Pemerintah Kalurahan	Anggapan bahwa lomba desa adalah formalitas	Desa tidak siap untuk mewakili lomba	Pendampingan intensif bagi perwakilan Kapanewon	C	2	2	4	Pembinaan dan pendampingan intensif	Jawatan Kemakmuran	Semester I Tahun 2025
F.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum												
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terwujudnya sinergitas Forkopimcam, dan terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat		Terjadinya konflik sosial dan perselisihan di masyarakat	Deteksi dini konflik belum efektif	Terganggunya situasi kondusif di masyarakat	Rakor lintas sektor dan patroli terpadu secara berkala	C	3	2	6	Mendorong terbentuknya jagawarga untuk deteksi dini konflik di seluruh kalurahan	Kepala Jawatan Keamanan	2025
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan		Apatisme masyarakat terhadap kesadaran berbangsa	Masifnya pengaruh media sosial dan peniadaan kegiatan kebangsaan di masa pandemi	Semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat menurun	Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	C	2	2	4	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan upacara PHBN	Kepala Jawatan Keamanan	2025
G.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa		Laporan pertanggungjawaban keuangan tidak akuntabel	Penatausahaan keuangan kurang cermat	Adanya temuan pemeriksaan oleh APIP	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan	C	2	3	6	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan secara berkala	Kepala Jawatan Praja	Tri wulan 2 dan 4 Tahun 2025

Panjatan, 10 Maret 2025

Panewu Panjatan

Jumarna, SIP.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196704121991031016